

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA
31 DESEMBER 2024**

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Mangun Pundiya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

795414-3-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-601343-16012025105439

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bprmangun@bprmangunpundiya.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-16 10:54:39

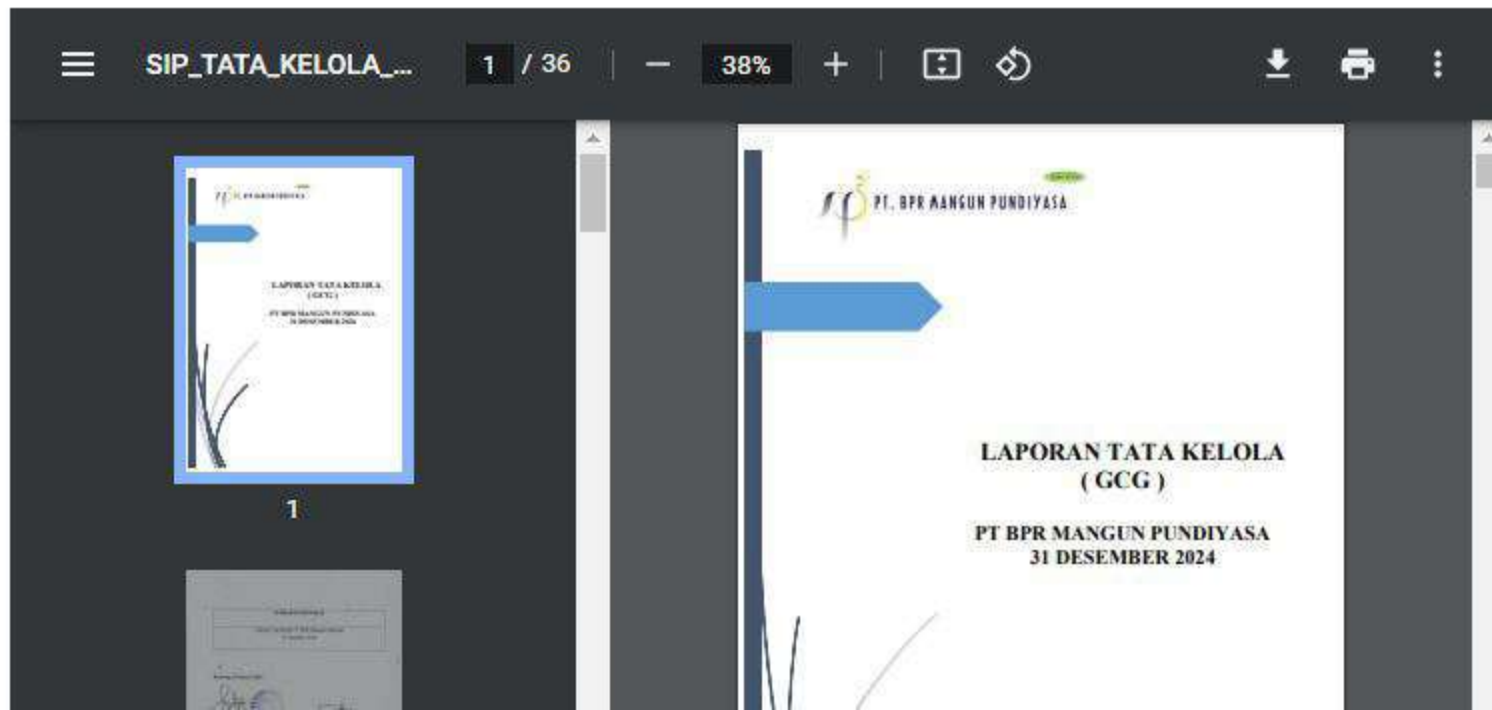


Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiya 2024

January 22, 2025 bprmangu Tata Kelola 0 Comments

Search ...



Recent Posts

- > SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiya 2024
- > SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiya 2023
- > SIP Tata Kelola BPR Mangun Pundiya 2022
- > Kunjungan Gempa Cianjur

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tata Kelola PT. BPR Mangun Pundiya

31 Desember 2024


Bandung, 09 Januari 2025



Srivanti

Direktur Utama

Membawahkan Kepatuhan



Tatang Sumanta

Direktur

Menyetujui,



Imanuella Simangunsong

Komisaris Utama



Firman Ismanto


Komisaris

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR MANGUN PUNDIYASA
Posisi : DESEMBER 2024
Modal Inti : Rp. 4.999.128.456
Total Aset : Rp. 15.329.445.384

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.58	Baik
Analisis	

Bandung, 09 Januari 2025


Sriwanti
Direktur Utama
Membawahkan Kepatuhan



PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

Together We Grow



Bandung, 09 Januari 2025

Nomor : 015/DIR/BPR-MP/I/2025
Hal : **Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2024**
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth.
Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : oijkjawabarat@ojk.go.id ; cep_s@ojk.go.id ; eka.jatnika@ojk.go.id

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK ,dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2024,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui www.perbarindo.org.
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisaris Utama PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

(Sriyanti)
Direktur Utama
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth.DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke www.perbarindo.org
2. Yth. Komisaris Utama BPR Mangun Pundiya.
3. Website www.bprmangunpundiya.co.id

TEMBUSAN

Bandung, 09 Januari 2025

Nomor : 015 /DIR/BPR-MP/I/2025
Hal : **Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2024**
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth.
Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Barat
Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : ojkjawabarat@ojk.go.id ; cep_s@ojk.go.id ; eka.jatnika@ojk.go.id

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2024,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui www.perbarindo.org.
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisaris Utama PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.



PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

Together We Grow



Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA

(Sriyanti)

Direktur Utama

Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth. DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke www.perbarindo.org
2. Yth. Komisaris Utama BPR Mangun Pundiya.
3. Website www.bprmangunpundiya.co.id

PT BPR MANGUN PUNDIYASA

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
2024

PT BPR MANGUN PUNDIYASA

JL. A YANI
BANDUNG
JAWA BARAT

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat pada tahun 2024, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR MANGUN PUNDIYASA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR MANGUN PUNDIYASA tahun 2024 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Sriyanti
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt 2) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
2	Nama : Tatang Sumanta
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<p>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.</p> <p>b. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja.</p> <p>c. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</p> <p>d. Menghimpun dana;</p> <p>e. Menyalurkan Kredit;</p> <p>f. Menempatkan dana pada bank lain.</p> <p>g. Menerima penempatan dana dari bank lain</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
1)	
2)	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Imanuella Simangunsong
	NIK *) :
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : Firman Ismanto
	NIK *) :
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - 2) - 	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
	-						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

****) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sriyanti		-	-
2	Tatang Sumanta		-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sriyanti		-	-	-
2	Tatang Sumanta		-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- ***) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		Rp. 457.000.000	15,23%
2	Firman Ismanto		-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		-	-	-
2	Firman Ismanto		-	-	-

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Firman Ismanto		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	M.M			
--	-----	--	--	--

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”.

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong		Tidak ada	Tidak ada	Paul Rospita Simanjuntak (Ibu kandung), Wesly Simangunsong (Bapak Kandung)
2	Firman Ismanto		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”.

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2 orang		2 orang	

2	Tunjangan jabatan				
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham	-		-	
5	Remunerasi lainnya				
Total					

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Kendaraan roda 4	Sewa Kendaraan roda 4
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan-	BPJS Kesehatan -
4	Fasilitas Lainnya *)	Tunjangan THR Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali (Apabila laba dalam 12 bulan) Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan) Tunjangan Komunikasi	Tunjangan THR Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali (Apabila laba dalam 12 bulan) Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan) Tunjangan Komunikasi

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)		
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)		

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18 Januari 2023	4 orang	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur	Pengawasan Terhadap Penentuan Profil Resiko Calon Debitur Kredit

			<ul style="list-style-type: none"> - Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Parameter Profile Risiko Calon Debitur - Pengklasifikasian profile risiko calon debitur berdasarkan self assessment - Deteksi awal kualitas pembayaran debitur serta antisipasi penanganan masalah terkait pembayaran debitur
2	08 Juli 2024	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Direktur Utama - Direktur - Business Manager 	Pengawasan Dewan Komisaris
3	08 Juli 2024	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Direktur Utama - Direktur - Business Manager 	<p>Rapat Direksi terkait Restrukturisasi Kredit dan Hapus Buku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Periode Juni 2024 - Laporan Debitur Restrukturisasi Kredit (eksekusi Juni 2024) - Laporan Hapus Buku (eksekusi Juni 2024)
4	17 Oktober 2024	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala Operasional - IT 	Meeting CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)
5	30 Oktober 2024	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	Action Plan Funding Dalam Waktu Dekat – Desember 2024
6	11 Desember 2024	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	Pembahasan RBB 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Imanuella Simangunsong		100 %	-	100 %
2	Ir. Firman Ismanto M.M		50 %	-	50%

5 JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil	1	nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

***) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

****) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

6 JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

7 TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

(ini digunakan posisi laporan tahun 2022)

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
-									

(ini digunakan posisi laporan tahun 2022 dan seterusnya)

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

8 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

9 HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Terlampir

10 KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Terlampir

PT. BPR Mangun Pundiya

Bandung, 09 Januari 2024



Skranti
Direktur Utama

Membawahkan Kepatuhan